

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, membawa dampak yang sangat luas dalam tata kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Di era Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan berjalan hanya semata-mata mengikuti kehendak penguasa dengan menjadikan birokrasi kekuasaan di pusat-pusat pemerintahan sebagai ujung tombak utama dengan mengabaikan berbagai potensi yang ada di masing-masing daerah. Dampak langsung dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah semakin seragam potensi dan kepentingan daerah yang ada.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berakhirilah penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945, khususnya yang menyangkut hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti. Adapun landasan pemikiran dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan rumusan tersebut, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengisyaratkan dan menghendaki bahwa pemerintahan desa (berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979) diganti dengan pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat dan asal usul daerah yang bersifat istimewa. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tetap

merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kepada desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga masyarakatnya.

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ada satu hal yang menarik yang menjadi kekhasan dalam praktik demokrasi dalam hal memilih pemimpin di tingkat desa. Hal tersebut adalah tidak di pakainya partai politik untuk mengusung calon calon yang akan bertarung dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Meskipun demikian bukan berarti dinamika politik dalam pilkades jadi hambar. Justru absennya partai politik dalam kontestasi pilkades, menjadikan dinamika pilkades memiliki daya saing yang sama dengan dinamika pemilihan kepala daerah ataupun presiden sekalipun .

Desa merupakan salah satu sub wilayah paling kecil dalam sebuah negara. Yang mana memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya(kepentingan masyarakat setempat).²

¹. Gaffar, Janedri M, 2013. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konpress, Jakarta. Hal. 72

². Wikipedia Indonesia, 2008. *Sejarah Pemilu*. <http://WikipediaIndonesia.co.id> Diakses pada tanggal 13 Juli 2018

Sebagaimana sebuah negara yang merupakan sebuah organisasi yang lebih besar dari desa, desa memiliki sistem dan mekanisme tersendiri terutama dalam menentukan siapa dan bagaimana sosok pemimpinnya. Mekanisme atau proses tersebut sebelum adanya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, di atur dalam peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 yang merupakan turunan dari UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.

Sosok pemimpin ideal di desa dilahirkan dari sebuah proses politik di tingkat desa melalui sistem demokrasi *election* (pemilihan). Dalam perkembangannya pemilihan kepala desa terutama di era reformasi lebih cenderung bersifat terbuka, artinya setiap warga masyarakat desa yang memenuhi syarat tertentu berhak memilih dan di pilih, baik untuk mencalonkan diri atau memilih orang lain di luar dirinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Proses ini secara tidak langsung menumbuhkan berkembang demokrasi di tingkat lokal terutama dalam level desa. Jika pemilihan kepala desa bersifat langsung, terbuka dan dewasa, barang tentu menjadi bibit berharga bagi kualitas demokrasi pada level yang lebih luas (negara, propinsi atau kota),

Desa kateng kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah merupakan salah satu desa di kabupaten lombok tengah provinsi nusa tenggara barat. Desa kateng merupakan contoh pemilihan kepala desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan. Hal ini dapat dilihat pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon kepala desa kateng berkomputisi untuk mencari dukungan massa sebanyak banyaknya dengan

cara menjajikan sesuatu kepada warga masarakat desa atau dengan me *lobby* warga desa kateng.

Upaya dalam me lobby warga Desa Kateng yaitu dengan mendekati ulama – ulama, pemuda – pemudi karang taruna desa kateng dan saudara – saudara kerabatnya. Di samping itu calon kepala desa kateng menggunakan money politics yaitu dengan cara membagi bagikan unag , sembako kepada warga desa , dengan maksud agar warga desa mendukung calon kepala desa tersebut.

Calon kepala desa Kateng mendekati para ulama untuk mendapatkan dukungan agar terpilih sebagai kepala desa kateng, dengan cara menjalin silaturahmi, bertandang ke rumah ulama tersebut, sehingga ulama dapat menyebarkan pengaruh ulama tersebut kepada warga desa. Para ulama Desa Kateng mempunyai pengaruh besar terhadap warga Desa Kateng, karena di anggap sebagai panutan dan sesepuh.

Disamping itu, Calon Kepala desa kateng dapat me-lobby pemuda pemudi karang taruna Desa kateng dengan cara menjanjikan fasilitas fasilitas yang mendukung perkembangan karang taruna. Karang taruna merupakan wadah pemuda – pemudi, sehingga calon krpala desa memperoleh dukungan dari kaum pemuda – pemudi Desa Kateng. Saudara atau kerabat dekat dari calon kepala desa Kateng tentu saja dapat memilih calon kepala Desa Kateng tersebut untuk dapat memenangkan suaranya, sehingga terpilih menjadi keoala desa kateng,

Peristiwa adanya pemilihan kepala desa kateng tersebut menimbulkan kompetisi atau persainagan antar calon kepala desa kateng.

Masing masing calon kepala desa kateng menyebarkan pengaruhnya kepada warga desa kateng untuk mendapatkan dukungan sehingga warga desa akan memilihnya menjadi kepala desa.

Upaya untuk menarik simpati dari warga desa kateng. Calon kepala desa akan mendekatinya dengan menjalin silaturahmi dengan tokoh tokoh masyarakat desa kateng seperti tokoh agama, kalangan pemuda- pemudi dan kerabat kerabatnya. Upaya calon kepala desa tersebut dibarengi dengan janji janji yang nantinya setelah terpilih menjadi kepala desa kateng maka harus merealisasikannya.

Salah satu tantangan yang perlu di teliti adalah bagaimana dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa. Sehubungan dengan adanya fenomena tersebut, maka penulis bermaksud mengkaji dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul: “ Dinamika politik Pedesaan dalam pemilihan kepala desa kateng kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah “

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu di rumuskan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika pemilihan kepala desa kateng ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan kepala desa kateng Kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah?
2. Bagaimana hubungan antar aktor yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa kateng kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut Sugiono (2004:74) adalah untuk menemukan problematik baru, membuktikan atau menguji kebenaran mengembangkan serta mengadakan ramalan dan membuat generalisasi dari pengetahuan yang ada / subjek penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dinamika pemilihan kepala desa di tinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan kepala desa kateng kecamatan praya barat Kabupaten lombok tengah.
2. Untuk memetakan pola hubungan / relasi dari aktor aktor yang terlibat dalam pemilihan Kepala desa kateng kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat dan peneliti khususnya dengan tujuan memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih terhadap dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa kateng kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah.

1. a. Untuk kepentingan penyusun, yaitu untuk menambah khasanah teoritis dan pengetahuan serta sebagai tempat atau wadah untuk menerapkan teori teori tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa yang di peroleh selama di bangku kuliah,
b. Untuk kepentingan ilmiah, yaitu untuk mengembangkan konsep yang bermanfaat dan membangun bagi ilmu pemerintahan, khususnya kajian politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa.
2. Untuk lembaga yang terkait, yaitu sebagai masukan yang berkaitan dengan berbagai persoalan tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa.

E. Definisi Konsep

Definisi konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang di rumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Definisi mengenai konseptual yang ada dengan memeperhatikan tema (objek) penelitian, maka dapat di temukan beberapa konsep yang perlu ddefiniskan dengan tujuan agar peneliti dan pembaca memiliki presepsi atau pemahaman yang mana. Mekan peneliti memberikan konseptual sebagai berikut.

1. Dinamika politik pedesaan

Politik pedesaan, khususnya dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa mengalami perkembangan serta perubahan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan kepala desa yang mengalami perubahan akibat proses formasi maupun reformasi dari adanya suatu undang- undang. Keeadaan yang tidak stabil dalam

pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat terjadi karena konflik antar individu atau karena adanya konflik antar bagian dari kelompok sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di dalam suatu kelompok pendukung calon kepala desa tertentu.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat mengakibatkan segolongan atau sebagian yang ingin membuat kekuasaan dengan mengorbankan golongan lainnya. Ada kepentingan yang tidak seimbang sehingga timbul ketidakadilan. Ada pula perbedaan paham tentang cara – cara memenuhi tujuan dari calon kepala desa tertentu atau kader pendukungnya dan lain sebagainya. Kesemuanya itu mengakibatkan perpecahan di dalam kelompok masyarakat.

2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBD Desa yang bersumber pada APBD Kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahap penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut di atas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada badan permusyawaratan desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota memberikan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk keputusan Bupati/walikota. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang di tunjuk paling 30 hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota.

Menurut Nasroen, desa di indonesia telah ada sejak beratus – ratus tahun yang lampau. Dari zaman ke zaman, desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada samapi dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pula Sriwijaya, Atjeh, Bugis, Minagkabau, Mataram dan sebagainya. Hindia Belanda, penduduk Jepang telah lenyap, tetapi desa, nagari, marga itu tetap ada. Dalam jalan sejarah ini, sebagai bukti diambil kesimpulan bahwa sesuatu Negara akan tetap ada. Dari jalan sejarah ini, sebagai bukti da[at diambil kesimpulan bahwa sesuatu Negara akan tetap ada, selama desa, nagari, marga itu ada, asal negara itu sanggup meyatukan dirinya dengan desa, nagari dan marga itu.⁴ Sedagkan menurut Undang-undang Republik ndonesia No 6 Taun 2014 tentang Desa tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 No 1 bawahsannya,

⁴ Nasroen. Daerah Otonomi Tingkat Tebawah. (Jakarta : Beringin Trading Company, 195) Hal 41.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal – usul, adat istiadat dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Jadi untuk keperluan pengurus masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.⁶

^{5.} Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

^{6.} Undang -undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan yang atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.

Dengan demikian definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan dipelajari dan dianalisa, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas, diantaranya sebagai berikut :

1. Proses Pemilihan dan Pemetaan Actor Pilkades Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah
 - a. Proses Pilkades Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah
 - b. Tahap Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon
 - c. Tahap Penetapan Pemilih
 - d. Tahap Kampanye dan Strategi Politik Calon Kepala Desa
 - e. Tahap Pelaksanaan Pilkades
2. Strategi Politik Calon Kepala desa Dalam Meraih Kemenangan
 - a. Dinamika Pemilihan Kepala Desa Kateng di tinjau dari konflik dan Kompetisi yang Berlangsung
 - b. Strategi Yang di gunakan Calon Kepala desa

6. Metode Penelitian

Metodologi penelitian Ilmu Pemerintahan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Demi

terwujudnya tujuan tersebut maka metode penelitian yang peneliti gunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti ingin melihat secara langsung tanpa memberikan perlakuan berkaitan dengan politik pedesaan dalam pemilihan Kepala Desa Kateng Kecamatan Praya rat Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk meneliti kondisi yang sebenarnya yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain secara nyata dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini pelaksanaan penelitian dan kajiannya didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap. Sehingga data tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Jadi penelitian deskriptif dalam bidang Ilmu Pemerintahan merupakan hal yang cukup penting.⁸

7. Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung. Remaja Rosdakarya, 2002. Hal 35

8. Soehartono, Irawan. *Opcit.* Hal : 69

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun jenis data yang digunakan peneliti demi kesempurnaan penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan hasil penelitian wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya secara langsung kepada pemerintah dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan cara melakukan study kepustakaan serta mebumpulkan beberapa keterangan atau fakta secara langsung melalui refresni buku-buku, perundang-undangan, hasil penelitian, jural-jurnal, artikel, internet, bahan kuliah dan bahan-bahan yang lainnya yang mempunyai relevansi kongkrit dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan penacatatan sesuatu obejk dengan sistematika fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.⁹ Observasi dapat dilakukan sesaat atau dapat diulang, oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat, dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai *Observer* dan objek yang diobservasi yang dikenal sebagai *observee*.⁹

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Tentu saja kreatifitas wawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih tergantung dari pewawancara.¹⁰

^{9.} Kusunaka Adinihardjo. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, Hal 69

^{10.} Kusnaka Adinihardjo, *opcit.* Hal 93

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat variabel peneliti melekat oleh karena itu subjek adalah seseorang atau lebih yang dipilih dengan sengaja sebagai nara sumber data yang dikumpulkan, karena dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian.

Adapun Subjek yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a). Tokoh Masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh Pemuda
- b). Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan
- c). Warga Masyarakat Desa Kateng
- d). Kepala Desa Kateng
- e). Perangkat Desa
- f). Pengurus LKMD
- g). Pengurus BPD
- h). Kepala Dusun

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dijadikan penelitian dari skripsi ini adalah di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

6. Teknik analisa Data

Pada tahapan ini data dan dokumen- dokumen yang berhasil di dapatkan dan kemudian akan di analisa serta disusun secara berurutan (sistematis) sehingga dari data yang di peroleh dan akan di analisis

dengan metode kualitatif, dengan cara menggambarkan hasil dari pada studi lapangan, hasil dokumentasi dan hasil pustaka, kemudian dari data yang diperoleh akan di analisis untuk menjawab dari permasalahan. Penelitian kualitatif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan penegasan suatu konsep serta gejala – gejala dengan menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan obyek dari penelitian.¹¹

Analisa data dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian dan pengurutan data yang di peroleh secara sistematis baik unruk menafsirkan dan menginterpretasikan data- data yang dapat dari penelitian.

Proses analisa data ini dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumbr data baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa kualitatif dengan jenis deskriptif dimana lebih menitikberatkan pada penggambaran penguraian objek yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan.

¹¹. Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Reamja Rosdakarya, 2002. Hal 67

Meurut Bogdan mengartikan analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain, sehingga temuannya dapat dipahami orang lain.¹² analisis data menurut sugiyono meliputi : ¹³

a. Periode pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan empat cara yaitu content, analysis, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Reduksi data berarti pengurangan data yang jumlahnya cukup banyak dengan merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.

c. Display Data

Display data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema yang telah di tentukan berdasarkan rumusan masalah penelitian dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif.

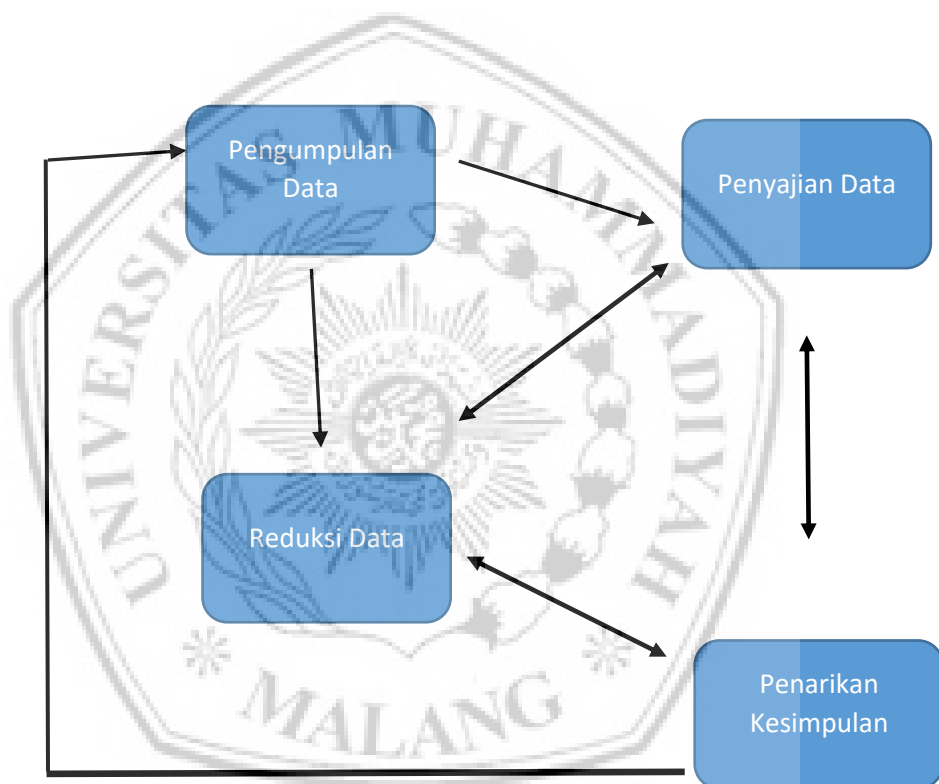
¹². Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002. Hal 67

¹³. Maloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosdakrya. 2005

d. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan didapat dari hasil pengumpulan data, reduksi data, dan display data. Penarikan kesimpulan/verifikasi juga perlu dukungan bukti-bukti yang kuat supaya kesimpulan dari penelitian dapat dipercaya (valid)

Gambar 1.1 Komponen –Komponen dalam Analisis data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Haberman (Sugiyono, 2008 : 183)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran konfigurasi yang utuh dari objek penelitian. Proses pengambilan kesimpulan ini merupakan proses pengambilan inti dari penelitian yang kemudian di sajikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat.

Penulis menggunakan triangulasi dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari data yang absah. Dalam hal ini penulis menggunakan dua langkah, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan bandingkan keadaan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Hal ini mempertimbangkan bahwa kedua langkah tersebut lebih praktis dan bersifat objektif. Berdasarkan analisa di atas, peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian dicari generalisasi yang memiliki sifat umum.¹⁴

Kesimpulan disini merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa kateng kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah, baik itu dari proses pelaksanaanya. Inti dari kesimpulan tersebut merupakan hasil dari peneliti lakukan di kantor desa kateng kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah, khususnya pada strategi kepemimpinan camat dalam meningkatkan evektifitas kinerja pegawai, dan hasil perbandingan antara hasil observasi dan hasil wawncara dari berbagai phak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

¹⁴. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung.